

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normaif, penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum⁵⁴. yaitu dengan melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 355/K/Pdt.Sus/2012 jo. Nomor 589/K/Pdt.Sus/2012 jo. Nomor 472K/Pdt.Sus-BPSK/2014 jo. Nomor 572/K/Pdt.Sus/2014 jo. Nomor481/K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen, untuk memperoleh hasil dari apa yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam memutus kewenangan Badan Peneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen dan kekuatan putusan BPSK yang tidak tidak dibatalkan meskipun BPSK telah dinyatakan tidak berwenang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian terdiri dari dua macam pendekatan, yaitu:⁵⁵

- a. *Statute Approach*, yaitu pendekatan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

⁵⁴ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 24.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 134.

Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen agar dapat meneliti mengenai disparitas Putusan Mahkamah Agung dalam memutus kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen serta kekuatan putusan BPSK yang tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung Nomor 355/K/Pdt.Sus/2012 jo. Nomor 589/K/Pdt.Sus/2012 jo. Nomor 472K/Pdt.Sus-BPSK/2014 jo. Nomor 572/K/Pdt.Sus/2014 jo. Nomor 481/K/Pdt.Sus-BPSK/2015).

- b. *Case Approach*, yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah, analisis dan mempelajari kasus terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 355/K/Pdt.Sus/2012 jo. Nomor 589/K/Pdt.Sus/2012 jo. Nomor 472K/Pdt.Sus-BPSK/2014 jo. Nomor 572/K/Pdt.Sus/2014 jo. Nomor 481/K/Pdt.Sus-BPSK/2015

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)⁵⁶, yang terdiri dari:
 - a. Pasal 1 Butir (2) dan Butir (11), Pasal 23, Pasal 45, Pasal 52 dan Pasal 57 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
 - c. Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 - d. Pasal 54 Ayat (1) butir (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS
 - e. Pasal 1 Butir (2) dan (8), Pasal 3, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001
 - f. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 355/K/Pdt.Sus/2012
 - h. Putusan Mahkamah Agung Nomor 589/K/Pdt.Sus/2012
 - i. Putusan Mahkamah Agung Nomor 472K/Pdt.Sus-BPSK/2014
 - j. Putusan Mahkamah Agung Nomor 572/K/Pdt.Sus/2014
 - k. Putusan Mahkamah Agung Nomor 481/K/Pdt.Sus-BPSK/2015
5. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut

⁵⁶ Zainuddin Ali, **Op.Cit**, hlm 47.

terdiri atas (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim. bahan hukum yang dapat memberikan keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer⁵⁷, dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen.

6. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan internet.

1. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik yang akan digunakan penulis dalam memperoleh bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dalah dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengutip dan mempelajari bahan hukum dari sumber sumber yang tersedia di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang, dan melalui penulusuran di situs internet.

⁵⁷ Zainuddin Ali, **Op.Cit**, hlm 54.

2. Teknik Analisia Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dalam hal ini adalah Undang-Undang dan Putusan Pengadilan akan dijelaskan dalam bentuk uraian yang akan disusun secara sistematis menyesuaikan dengan rancangan alur pembahasan, kemudian dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal merupakan penafsiran kata dalam undang-undang dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.⁵⁸

3. Definisi Konseptual

1. Disparitas adalah adanya persamaan suatu perkara, tetapi terdapat perbedaan putusan hakim atas perkara tersebut.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 355/K/Pdt.Sus/2012 menyatakan bahwa BPSK berwenang menyelesaikan sengketa konsumen, Putusan Mahkamah Agung Nomor 589/K/Pdt.Sus/2012 menyatakan bahwa BPSK berwenang menyelesaikan sengketa konsumen, Putusan Mahkamah Agung Nomor 472K/Pdt.Sus-BPSK/2014 menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa konsumen, namun tidak pernah membatalkan putusan BPSK, Putusan Mahkamah Agung Nomor 572/K/Pdt.Sus/2014 menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa konsumen, namun tidak pernah membatalkan putusan BPSK, Putusan Mahkamah Agung Nomor 481/K/Pdt.Sus-BPSK/2015 menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang

⁵⁸ Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 63.

menyelesaikan sengketa konsumen, namun tidak pernah membatalkan putusan BPSK.

3. Badan Penyelesaian Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen melalui mediasi, arbitrase dan konsiliasi.
4. Putusan BPSK adalah kesepakatan yang telah dicapai di mediasi, atau konsiliasi atau arbitrase dibuat dalam perjanjian tertulis dan dikuatkan dengan putusan majelis BPSK yang bersifat final.
5. Keberatan adalah suatu upaya hukum terhadap putusan BPSK dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dan selanjutnya terhadap keputusan Pengadilan Negeri dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung
6. Pembiayaan Konsumen adalah pembiayaan oleh perusahaan finansial kepada konsumen, didasarkan pada kebutuhan konsumen yang memiliki keterbatasan dana, yang dilakukan dengan sistem pembayaran angsuran.